



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tentang Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah di susun secara terperinci.
8. Integrasi adalah penyisipan inti sari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
9. Pendidikan Karakter antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan yaitu:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Sekolah Dasar sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama sederajat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter antikorupsi sejak dini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. Kerja sama;
- d. Publikasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diterapkan melalui pendidikan yang di intergrasikan pada:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. kegiatan kokurikuler.
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.

Pasal 6

- (1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. penyesuaian tema pada jenjang pendidikan anak usia dini; dan
 - b. penyesuaian mata pelajaran untuk jenjang sekolah dasar sederajat dan sekolah menengah pertama sederajat.

- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan diantaranya melalui:
 - a. Pendidikan Kepramukaan;
 - b. Kegiatan keagamaan;
 - c. Kantin kejujuran; atau
 - d. Latihan olah bakat.
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. Pemenuhan kurikulum:
 - 1. Pendidikan agama dan budi pekerti;
 - 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; atau
 - 3. Mata pelajaran lain yang relevan.
 - b. Penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai kurikulum, antara lain :
 - 1. tugas terstruktur terkait pendidikan antikorupsi; atau
 - 2. kegiatan literasi antikorupsi.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Langkah Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Inisiatif merancang, yaitu :
 - 1. Menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada jenjang pendidikan usia dini;
 - 2. Menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran agama dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan pada jenis sekolah dasar sederajat;
 - 3. Menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan bimbingan konseling yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diberikan pembelajaran pada jenjang sekolah menengah pertama sederajat;

4. Menentukan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 5. Memilih media dan sumber belajar (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman; dan
 6. Menentukan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler;
 - c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. Penyatuan pemahaman dan langkah integrasi dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bimbingan konseling;
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat satuan pendidikan antara pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di satu sekolah;
 3. Membangun sinergi dan berbagi praktik baik pendidikan antikorupsi antar pendidik dalam forum musyawarah guru mata pelajaran/keompok kerja guru/ kelompok kerja kepala sekolah;
 4. Membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 5. Membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan; dan
 6. Membangun sinergi antara pendidik dengan kelompok profesional lainnya.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala dinas menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih untuk melaksanakan pendidikan karakter antikorupsi.

- (2) Ketersediaan tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau instansi terkait dan melakukan bimbingan teknis pendidikan karakter antikorupsi.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar membentuk kelompok kerja integrasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan selaku ketua;
 - b. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Guru mata pelajaran Agama; dan
 - d. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUBLIKASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kelompok Kerja melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan Antikorupsi yaitu:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Pendidik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. melaksanakan supervisi pada Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memastikan:
 - a. Pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. Berjalannya penerapan nilai dan perilaku antikorupsi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui kepala dinas melaksanakan monitoring Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan.
- (2) Kepala dinas bersama Inspektur Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Satuan Pendidikan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan menginsersikan pendidikan anti korupsi pada modul pembelajaran dan/atau rencana pelaksanaan pembelajaran; dan

- b. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi bersumber dari:

- a. anggaran satuan pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 32